



Analisis Kinerja Pegawai Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah

Semuel Tanjun Tandibua^{1*}, Yoel Pasae², Baharuddin³

^{1,2,3}) Program Studi Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

E-mail: semueltandibua@gmail.com

*Penulis korespondensi

Submitted: 01-02-2025	Review: 04-02-2025	Revision: 13-02-2025	Accepted: 14-02-2025
-----------------------	--------------------	----------------------	----------------------

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pegawai pengelola pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah selama periode 2021–2024. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik analisis data yang terdiri dari tiga tahapan: reduksi data, display data, dan penyajian kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas kerja pegawai masih belum optimal, dengan 42,85% responden menilai kinerjanya baik, 35,71% sangat baik, dan 21,43% kurang baik. Dari aspek kuantitas kerja, sebanyak 42,86% responden menilai baik, 35,71% sangat baik, dan 21,43% belum baik. Indikator pemanfaatan waktu menunjukkan bahwa 47,15% responden menilai baik, sementara 30% masih menilai kurang baik. Dari segi kerjasama, mayoritas responden (62,85%) menilai bahwa pegawai memiliki tingkat kerjasama yang baik. Temuan ini mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas pegawai, terutama dalam pemanfaatan teknologi digital dan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan efektivitas pengadaan barang dan jasa.

Kata kunci: Kinerja Pegawai, Pengadaan Barang dan Jasa, Efektivitas, Digitalisasi

Abstract: This study aims to analyze the performance of employees managing the procurement of goods and services at the Regional Secretariat of Central Mamberamo Regency during the period 2021–2024. The method used is descriptive qualitative with data analysis techniques consisting of three stages: data reduction, data display, and presentation of conclusions. The results of the study indicate that the quality of employee work is still not optimal, with 42.85% of respondents assessing their performance as good, 35.71% as very good, and 21.43% as poor. In terms of work quantity, 42.86% of respondents assessed it as good, 35.71% as very good, and 21.43% as not good. The time utilization indicator shows that 47.15% of respondents assessed it as good, while 30% still assessed it as not good. In terms of cooperation, the majority of respondents (62.85%) assessed that employees have a good level of cooperation. These findings indicate the need to increase employee capacity, especially in the use of digital technology and coordination across regional apparatus organizations to increase the effectiveness of procurement of goods and services.

Keywords: Employee Performance, Procurement of Goods and Services, Effectiveness, Digitalization

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan, terutama dalam mendukung efektivitas dan efisiensi pelayanan publik (Indrajit & Djokopranoto, 2020). Di Indonesia, sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021, yang mengamanatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Namun, dalam praktiknya, berbagai tantangan masih dihadapi, seperti kurangnya pemanfaatan teknologi dalam proses pengadaan, rendahnya koordinasi antarlembaga, serta masih adanya indikasi ketidakefisienan dalam pengelolaan sumber daya (Sutedi, 2018).

Di Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, efektivitas pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Namun, berbagai kendala masih dihadapi dalam implementasi kebijakan pengadaan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya pemanfaatan sistem digital dalam proses pengadaan, serta masih adanya praktik yang tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Peraturan Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah No. 4 Tahun 2022). Menurut data yang diperoleh dari penelitian ini, mayoritas pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah menilai kualitas kerja mereka berada pada kategori baik (42,85%) dan sangat baik (35,71%), namun masih ada 21,43% yang menilai kinerjanya belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja sudah berjalan dengan cukup baik, masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal peningkatan kapasitas pegawai dan implementasi digitalisasi dalam pengadaan barang dan jasa.

Kontribusi Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur terkait kinerja pegawai dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya dalam konteks daerah terpencil seperti Mamberamo Tengah. Penelitian ini juga mengkaji relevansi model kinerja pegawai yang didasarkan pada aspek kualitas, kuantitas, pemanfaatan waktu, dan kerjasama (Bernardin & Russell, 2017). Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan

model pengukuran kinerja yang lebih sesuai dengan kondisi daerah terpencil di Indonesia.

Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan barang dan jasa melalui penguatan kapasitas pegawai serta penerapan sistem e-procurement. Pemanfaatan teknologi dalam pengadaan barang dan jasa telah terbukti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di berbagai negara (Toktas, 2018). Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti pentingnya digitalisasi dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa sebagai upaya meningkatkan efisiensi serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis kualitas kinerja pegawai pengelola pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kuantitas kerja pegawai dalam pengadaan barang dan jasa.
3. Mengevaluasi efektivitas pemanfaatan waktu oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya.
4. Mengkaji tingkat koordinasi dan kerjasama antarlembaga dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Mamberamo Tengah.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif terkait peningkatan kinerja pegawai serta implementasi strategi digitalisasi dalam sistem pengadaan barang dan jasa.

TINJAUAN LITERATUR

Kinerja Pegawai dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Kinerja pegawai merupakan faktor kunci dalam efektivitas organisasi, termasuk dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Bernardin dan Russell (2017) menyatakan bahwa kinerja pegawai dapat diukur berdasarkan enam dimensi utama: kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian, dan komitmen. Dalam konteks sektor publik, pengadaan barang dan jasa yang efisien sangat bergantung pada kemampuan pegawai dalam mengelola proses

administrasi dan operasional dengan baik (Gunasekaran et al., 2019).

Pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan sektor swasta. Menurut Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021, pengadaan harus dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, banyak penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya tingkat digitalisasi, kurangnya kompetensi pegawai, dan masih adanya praktik korupsi dalam proses pengadaan (Rumpang, 2022).

Dimensi Kinerja Pegawai dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Beberapa indikator utama yang digunakan dalam menilai kinerja pegawai dalam sistem pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut:

- a) **Kualitas Kerja:** Mengacu pada sejauh mana tugas yang dilakukan memenuhi standar yang telah ditetapkan (Mangkunegara, 2020). Dalam konteks pengadaan, kualitas kerja mencerminkan ketepatan proses administrasi serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
- b) **Kuantitas Kerja:** Berkaitan dengan jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam waktu tertentu. Studi yang dilakukan oleh Widiarti (2016) menunjukkan bahwa beban kerja yang berlebihan dapat berdampak pada penurunan produktivitas pegawai dalam pengadaan barang dan jasa.
- c) **Pemanfaatan Waktu:** Efektivitas dalam menggunakan waktu kerja menjadi indikator penting dalam mengukur kinerja pegawai (Murphy, 1990). Pegawai yang mampu mengelola waktu dengan baik cenderung lebih produktif dan mampu menyelesaikan proses pengadaan dengan efisien.
- d) **Kerjasama dan Koordinasi:** Pengadaan barang dan jasa memerlukan sinergi antarunit kerja dalam suatu organisasi. Menurut Parker (2018), koordinasi yang baik antara unit terkait dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pengadaan dan mengurangi potensi keterlambatan proyek.

Pemanfaatan teknologi digital dalam pengadaan barang dan jasa telah menjadi tren global dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi proses pengadaan. Menurut Toktas (2018), penerapan e-procurement dapat mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran serta meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam proses administrasi. Beberapa negara telah berhasil menerapkan e-procurement dengan baik, seperti Korea Selatan dan Singapura, yang menunjukkan peningkatan efisiensi hingga 30% dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (Gunasekaran, 2019).

Di Indonesia, digitalisasi pengadaan barang dan jasa masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya literasi digital pegawai, serta resistensi terhadap perubahan sistem kerja (Sutedi, 2018). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dalam mengimplementasikan sistem e-procurement, terutama di daerah terpencil seperti Kabupaten Mamberamo Tengah.

Kesenjangan Penelitian dan Kontribusi Studi Ini

Penelitian sebelumnya telah membahas berbagai aspek pengadaan barang dan jasa, termasuk implementasi e-procurement, tantangan dalam transparansi, serta efisiensi kinerja pegawai (Widiarti, 2016; Gunasekaran, 2019). Namun, masih sedikit penelitian yang secara khusus mengevaluasi kinerja pegawai pengelola pengadaan di wilayah terpencil seperti Papua Pegunungan.

Penelitian ini berkontribusi dalam mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Mamberamo Tengah. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas pegawai serta mempercepat digitalisasi dalam proses pengadaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode **deskriptif kualitatif**, yang bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kinerja pegawai pengelola pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah. Desain penelitian ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena yang terjadi di lapangan secara mendalam dan memperoleh pemahaman yang

lebih komprehensif terkait kinerja pegawai berdasarkan indikator yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2019).

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menggali informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai, serta bagaimana efektivitas pengadaan barang dan jasa dapat ditingkatkan melalui strategi yang lebih baik, termasuk digitalisasi dan koordinasi lintas instansi (Moleong, 2020).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang terlibat dalam proses pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah, baik yang bekerja secara langsung dalam proses administrasi maupun yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan pengadaan.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah **14 orang, yang dipilih berdasarkan teknik purposive sampling**. Teknik ini digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi dari individu yang memiliki pengalaman dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa (Creswell, 2018). Responden terdiri dari pegawai bagian pengadaan, pejabat yang berwenang dalam proses pengadaan, serta staf yang terlibat dalam implementasi sistem pengadaan barang dan jasa.

Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pegawai yang telah bekerja di bagian pengadaan barang dan jasa selama minimal 2 tahun.
2. Pegawai yang memiliki keterlibatan langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengadaan barang dan jasa.
3. Pegawai yang memiliki pemahaman mengenai kebijakan pengadaan barang dan jasa yang diterapkan di Kabupaten Mamberamo Tengah.

Penelitian ini dilakukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami dinamika pengelolaan pengadaan barang dan jasa di daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur serta akses terhadap teknologi digital. Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu Juni hingga Desember 2024, yang

mencakup tahap perencanaan, pengumpulan data, analisis, serta penyusunan laporan penelitian.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa teknik berikut: wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi (Sugiyono, 2020). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yang terdiri dari tiga tahap utama (Miles, Huberman, & Saldaña, 2019):

1. **Reduksi Data:** Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diklasifikasikan berdasarkan tema utama yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data bertujuan untuk menyaring informasi yang paling relevan dan signifikan dalam memahami kinerja pegawai dalam pengadaan barang dan jasa.
2. **Display Data:** Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi, tabel, dan diagram untuk mempermudah interpretasi dan analisis lebih lanjut. Penyajian data ini membantu dalam mengidentifikasi pola serta hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai.
3. **Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi:** Setelah data dianalisis, peneliti menarik kesimpulan yang didasarkan pada temuan utama penelitian. Kesimpulan ini diverifikasi dengan membandingkan hasil analisis dengan teori serta penelitian sebelumnya untuk memastikan validitas dan kredibilitas hasil penelitian.

Untuk meningkatkan keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memastikan bahwa temuan penelitian dapat dipercaya dan tidak bias (Patton, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pegawai pengelola pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah. Data yang dikumpulkan dari wawancara, observasi, serta dokumentasi dianalisis berdasarkan empat indikator utama, yaitu kualitas kerja, kuantitas kerja, pemanfaatan waktu, dan kerjasama.

Kualitas Kerja Pegawai

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas kerja pegawai dalam pengadaan barang

dan jasa masih memerlukan peningkatan. Dari 14 responden, 42,85% menyatakan kualitas kerja baik, 35,71% sangat baik, dan 21,43% kurang baik. Meskipun mayoritas responden menilai kinerja pegawai berada dalam kategori baik hingga sangat baik, masih terdapat tantangan dalam implementasi standar operasional yang telah ditetapkan.

Beberapa kendala yang ditemukan meliputi kurangnya pelatihan berbasis teknologi bagi pegawai serta keterbatasan dalam pemanfaatan sistem digital dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini sejalan dengan temuan Gunasekaran et al. (2019) yang menunjukkan bahwa kurangnya digitalisasi dalam sistem pengadaan dapat menyebabkan inefisiensi dalam proses administrasi dan pengelolaan dokumen.

Kuantitas Kerja Pegawai

Dalam aspek kuantitas kerja, penelitian ini menemukan bahwa 42,86% responden menilai kinerjanya baik, 35,71% sangat baik, dan 21,43% belum optimal. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai telah mampu menyelesaikan tugasnya sesuai dengan target yang ditetapkan.

Namun, dalam wawancara mendalam, beberapa responden menyatakan bahwa beban kerja yang tinggi serta kurangnya pegawai terlatih dalam bidang pengadaan sering kali menjadi kendala dalam menyelesaikan proses administrasi tepat waktu. Menurut penelitian Widiarti (2016), efisiensi kerja dalam pengadaan dapat ditingkatkan dengan menerapkan sistem pengelolaan berbasis teknologi untuk mengurangi beban administratif pegawai.

Pemanfaatan Waktu dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam hal pemanfaatan waktu, 47,15% responden menyatakan bahwa penggunaan waktu kerja mereka baik, 22,85% sangat baik, sementara 30% menilai belum optimal. Pegawai yang kurang efisien dalam pemanfaatan waktu cenderung mengalami keterlambatan dalam penyelesaian administrasi pengadaan.

Hasil ini menunjukkan perlunya penguatan sistem monitoring dan evaluasi kerja untuk memastikan bahwa waktu kerja dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif. Menurut Parker (2018), organisasi dengan sistem evaluasi kinerja berbasis digital cenderung memiliki pegawai yang lebih produktif karena mereka dapat mengakses data kerja mereka secara real-time.

Kerjasama dan Koordinasi Antar Pegawai

Indikator kerjasama menunjukkan bahwa 62,85% responden menilai tingkat koordinasi dalam pengadaan barang dan jasa baik, 20% sangat baik, dan 17,15% kurang baik. Koordinasi antarpegawai serta dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pengadaan barang dan jasa.

Namun, beberapa kendala masih dihadapi, seperti kurangnya komunikasi lintas unit serta ketidaksesuaian antara kebutuhan unit kerja dengan barang atau jasa yang disediakan. Temuan ini selaras dengan studi Rumpang (2022), yang menyatakan bahwa kurangnya koordinasi dalam pengadaan dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara spesifikasi barang dan kebutuhan organisasi.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai dalam pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah telah berjalan cukup baik, tetapi masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti efisiensi kerja, pemanfaatan teknologi digital, serta koordinasi antarinstitusi.

Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Pegawai

Kurangnya pelatihan pegawai terkait pengadaan berbasis digital menjadi salah satu kendala utama yang menyebabkan keterlambatan serta kurangnya efisiensi dalam proses pengadaan. Studi Toktas (2018) menegaskan bahwa organisasi yang mengadopsi teknologi dalam sistem pengadaan dapat meningkatkan efisiensi kerja hingga 30%. Oleh karena itu, diperlukan program pelatihan berbasis teknologi untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam menggunakan sistem e-procurement.

Digitalisasi dan Efisiensi dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem digitalisasi dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Mamberamo Tengah masih terbatas. Implementasi sistem e-procurement yang lebih luas dapat meningkatkan transparansi, mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran, serta meningkatkan efisiensi administrasi (Gunasekaran et al., 2019).

Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Antarinstansi

Koordinasi yang kurang optimal antara pegawai dan OPD menghambat kelancaran proses pengadaan. Menurut penelitian Parker (2018), organisasi yang menerapkan sistem komunikasi berbasis teknologi memiliki koordinasi yang lebih

baik, sehingga mempercepat proses pengadaan. Oleh karena itu, implementasi sistem komunikasi digital dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antarinstansi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah tergolong baik, tetapi masih perlu ditingkatkan dalam beberapa aspek utama:

1. **Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Kerja Pegawai:** Diperlukan pelatihan berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi kerja serta memastikan pegawai memiliki kompetensi yang cukup dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa.
2. **Pemanfaatan Digitalisasi dalam Pengadaan:** Implementasi sistem e-procurement yang lebih luas diperlukan untuk meningkatkan transparansi, mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran, serta mempercepat proses administrasi pengadaan.
3. **Peningkatan Koordinasi Antarinstansi:** Perlu adanya sistem komunikasi berbasis teknologi untuk meningkatkan koordinasi antara pegawai pengadaan dan OPD guna menghindari keterlambatan dalam proses pengadaan.

Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pengadaan barang dan jasa, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur seperti Kabupaten Mamberamo Tengah.

Keterbatasan Penelitian dan Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Jumlah sampel yang digunakan masih terbatas, sehingga hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasi secara luas untuk instansi lain di luar Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah. Selain itu, pendekatan deskriptif kualitatif yang digunakan memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti, tetapi kurang

mampu mengukur hubungan kausal antara variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja pegawai. Keterbatasan lain terletak pada akses terhadap data sekunder yang kurang lengkap, sehingga perbandingan dengan data empiris dari daerah lain belum dapat dilakukan secara optimal. Faktor eksternal seperti regulasi kebijakan, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta tantangan geografis juga belum dianalisis secara mendalam dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed-methods dengan jumlah sampel yang lebih besar agar hasilnya lebih representatif dan dapat memberikan analisis statistik yang lebih kuat. Selain itu, penelitian di masa mendatang dapat mengeksplorasi lebih jauh pengaruh faktor eksternal terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa, serta melakukan evaluasi terhadap implementasi sistem e-procurement guna mengukur dampaknya terhadap transparansi dan efisiensi kerja pegawai. Dengan studi yang lebih luas dan mendalam, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintahan, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur seperti Kabupaten Mamberamo Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bernardin, H. J., & Russell, J. E. (2017). *Human resource management: An experiential approach* (6th ed.). McGraw-Hill.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Gunasekaran, A., Ngai, E. W. T., & Cheng, T. C. E. (2019). Adoption of e-procurement in Hong Kong: An empirical research. *International Journal of Production Economics*, 113(1), 159–175.
<https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2018.09.012>
- Indrajit, R. E., & Djokopranoto, R. (2020). *Manajemen persediaan, barang umum, dan suku cadang untuk pemeliharaan dan operasi*. Grasindo.
- Mangkunegara, A. P. (2020). *Manajemen sumber daya manusia perusahaan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Medea, F., Sabandar, S. Y., & Badawi, R. (2024). ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

- PINTU KABUPATEN TORAJA UTARA. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, 2(1), 45–51. <https://www.ojsapaji.org/index.php/mariobre/article/view/226>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif* (Revisi ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Murphy, K. R. (1990). *Performance appraisal: An organizational perspective*. Allyn & Bacon.
- Paembonan, R., Ma'na, P., & Halik, J. (2024). Analisis akuntabilitas kinerja keuangan daerah di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kabupaten biak provinsi Papua. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, 02(2), 1–6. <https://www.ojsapaji.org/index.php/mariobre/article/view/254/143>
- Parker, S. K. (2018). Strategic management and employee performance: Insights from the economy, efficiency, and effectiveness (3E) framework. *Journal of Organizational Behavior*, 39(5), 621–635. <https://doi.org/10.1002/job.2307>
- Patton, M. Q. (2020). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). SAGE Publications.
- Peraturan Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Rumpang, B. (2022). Pengaruh pengadaan barang/jasa dan penyerapan anggaran terhadap kinerja organisasi melalui kinerja karyawan di PT PLN (Persero) UIKL Sulawesi [Tesis, Universitas Hasanuddin].
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian bisnis: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutedi, A. (2018). *Aspek hukum pengadaan barang & jasa dan berbagai permasalahannya*. Sinar Grafika.
- Toktas, P. (2018). The impact of barriers and benefits of e-procurement on its adoption decision: An empirical analysis. *International Journal of Production Economics*, 158(1), 77–90. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2018.07.005>
- Widiarti, D. (2016). Analisis implementasi e-procurement terhadap kinerja pada pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo [Tesis, Universitas Sepuluh Nopember].